

ABSTRAK

Kabupaten Gresik merupakan jalur perekonomian Jawa Timur yang sering disebut dengan GERBANGKERTASUSILA (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan) sehingga peluang untuk meningkatkan perekonomian wilayah sangat terbuka terutama dengan meningkatkan sumber daya manusianya. Peningkatan mutu sumber daya manusia dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gresik pada seluruh kalangan masyarakat tidak terkecuali masyarakat penyandang cacat. Pengesahan Peraturan Bupati mengenai pendidikan inklusif bagi penyandang cacat merupakan salah satu wujud kebijakan afirmatif yang dihasilkan oleh pemerintah Kabupaten Gresik, kebijakan pertama dari rangkaian kebijakan yang dicanangkan pemerintah Kabupaten Gresik untuk penyandang cacat Kabupaten Gresik. Rancangan kebijakan untuk melanjutkan PERBUP mengenai studi inklusi oleh pemerintah Kabupaten Gresik akan berisi tentang ketenagakerjaan penyandang cacat. Sejak pengesahan PERBUP pendidikan inklusi, rancangan kebijakan ketenagakerjaan penyandang cacat mulai disosialisasikan dengan harapan agar masyarakat dan para penyandang cacat penyandang cacat telah siap ketika kebijakan ketenagakerjaan tersebut disahkan.

Metode kualitatif dipilih untuk dapat menemukan bentuk kebijakan afirmatif yang dimiliki oleh Kabupaten Gresik dalam pengaturan ketenagakerjaan penyandang cacat. dengan instrumen kebijakan yang dipilih oleh pemerintah Kabupaten Gresik maka dapat ditemukan pengaruh dari kebijakan afirmatif tersebut pada penyerapan tenaga kerja penyandang cacat di Kabupaten Gresik sehingga tidak hanya menyebutkan kebijakan apa saja yang dimiliki oleh Kabupaten Gresik namun juga dapat melihat lebih jelas apa saja yang dilakukan pemerintah kabupaten Gresik dalam upayanya peningkatan mutu sumber daya manusia yang disini adalah penyandang cacat dan pengaruhnya terhadap penyandang cacat di Kabupaten Gresik.

Kata kunci : *Kebijakan Afirmatif, Ketenagakerjaan, Penyandang Cacat, Instrumen Kebijakan*

ABSTRACT

Kabupaten Gresik is economy pathway of East Java that noun as GERBANGKERTASUSILA (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan) so the opportunity to improve the regions economy is very open especially to improve its human resources. The Gresik government improving the quality of human resources for all society and no exception for the people with disabilities. Declaring of Bupati Rules about inklusif education for the disable people the evidence of existence affirmative policies by Gresik Government. That's first policy of policy series about disable people which launched by Gresik Government. The draft of policy to continue the inclusion education will contain about employment of person with disabilities. Since declaring the Bupati Rules about ratification policy of employment with disabilities had been socialized with hope people in Gresik have ready when government approve the employment policy.

The qualitative method was chosen to be able to find the form of affirmative policies had owned by Kabupaten Gresik in the rules of employment with disabilities settings, policy instrument chosen by the government for help us find the form of affirmative policies force in the Kabupaten Gresik. So we can see what is the affirmative policy in Kabupaten Gresik but we can also explain the method from Gresik government to improve the human resources with disability and what is impact to the opportunity of disabilities employment.

Key words : affirmative policy, employment, disable person, policy instrument.